

# Mohammad Roem Diplomat Pejuang

Oleh Fachry Ali

*Hampir sepenuh karier Mohammad Roem berada dalam dunia diplomasi. Suatu dunia nonpersenjataan yang banyak memberikan andil dalam membawa Indonesia menuju kemerdekaannya justeru di saat-saat senjata fisik tidak lagi bisa berbicara lantang. Dalam tulisannya ini Fachry Ali melukiskan, bagaimana peranan Roem dalam dunia politik Indonesia disaat masyarakat intelektual pribumi masih dicekam sugesti superioritas Barat. Di sana Roem tampil untuk membangkitkan rasa rendah diri bangsanya melalui meja perundingan di antara hingar-bingarnya pertempuran di daerah pinggiran kota.*



Beberapa minggu sebelum Muktamar pertama Partai Muslimin Indonesia (PMI) dilaksanakan di Malang pada tahun 1968 telah tersiar kabar bahwa tokoh-tokoh tua Masyumi akan ikut memperkuat partai baru tersebut. Salah seorang di antara tokoh senior itu, Mohammad Roem. Mengapa Roem dan kawan-kawan<sup>1</sup> mau serta tampil? Jawaban yang terdengar adalah karena dewasa itu, PMI dipimpin golongan muda yang dinilai kurang cukup mendapat dukungan massa, dan belum dikenal luas.<sup>2</sup>

Kondisi obyektif menunjukkan benarnya alasan itu. Kembalinya tokoh-tokoh tua Masyumi ini dalam bidang politik disambut hangat oleh seluruh peserta Muktamar.<sup>3</sup> Mereka seakan-akan memberikan nafas baru pada organisasi massa pendukung Masyumi yang telah mati dalam bidang politik. Roem yang terpilih sebagai Ketua Umum PMI dalam Muktamar 2-7 November 1968 itu<sup>4</sup>, seakan mewakili aspirasi ormas-ormas ini. Bahkan juga tokoh-tokoh senior.<sup>5</sup>

Roem tidak pernah bisa melaksanakan tugasnya sebagai ketua partai yang baru ini, sebab dalam sidang Kabinet yang berlangsung tanggal 20 November 1968—beberapa hari setelah Muktamar—Presiden Soeharto menegaskan, berdirinya PMI bukan berarti rehabilitasi Masyumi. Disebutkan tujuan pendirian PMI sebagai penampung ormas-ormas Islam yang belum mempunyai wadah.<sup>6</sup> Praktis kepemimpinan Roem tidak berjalan. Itulah akhir karier politik Roem. Sampai meninggal, Roem tidak pernah lagi bersentuhan dengan dunia politik.

Masalah yang menarik adalah mengapa Roem mau kembali dalam dunia politik? Bahkan, setelah ia disingkirkan dari Ketua Partai, ia mau menjadi calon PMI mewakili daerah Jawa Timur, walaupun Natsir telah memperingatkan pemilihan itu hanyalah *the selection for the selected peoples*?<sup>7</sup> Padahal Ketua PMI yang baru, Mintaredja SH telah mencalonkan Roem sebagai anggota DPR,

kuat lainnya, seperti Natsir, Prawoto, Kasman dan Syarif Usman. Hanya, demi maliciakan jalan bagi Roem, mereka bersedia mundur. *Ibid.*

6. *Sinar Harapan*, 15 Januari 1971.

7. M. Natsir, "Insya Allah, Roem tetap Roem?", dalam Soemarso Soemarsono, *Moh. Roem 70 tahun, Pejuang Perunding*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 209-214.

1. Moh. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Burhanudin Harahap dan Syafrudin Prawiranegara.

2. Nusantera, 21 Oktober 1968. Lihat juga *KAMI*, 4 November 1968.

3. *Djakarta Times*, 8 November 1968.

4. *Angkatan Baru*, 11 November 1968.

5. Dikabarkan, sebenarnya ada beberapa calon

bersama beberapa orang lainnya—sungguhpun atas desakan Djarnawi Hadikusumo.<sup>8</sup>

Tak ada jawaban yang pasti mengapa Roem kembali menekuni dunia politik. Jawabannya mungkin bisa ditelusuri pada proses sosialisasi intelektual Roem, sistem lingkungan nasional yang melahirkannya serta berbagai kegiatan politik yang pernah dilaksanakannya.

## Munculnya Roem dalam Gerakan Nasionalisme

Roem adalah putera keenam Dulkarnaen Djojosasmito, Lurah Klewogan, Kawedanan Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Di desa inilah ia lahir pada tanggal 16 Mei 1908. Pendidikan pertamanya ditempuh di *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*, lalu dilanjutkan ke *School tot Opleiding voor Indische Arts (STOVIA)*, sebuah sekolah untuk pendidikan dokter pribumi di Jakarta yang untuk tingkat persiapannya ia selesaikan pada tahun 1927. Ia melanjutkan ke *Algemene Middelbare School (AMS)* dan lulus pada tahun 1930. Namun tidak melanjutkan ke *Geneeskundige Hoge School (GHS)*, Sekolah Tinggi Kedokteran. Dua kali ia mengikuti ujian masuk, dua kali gagal, atau menganggur selama dua tahun.<sup>9</sup>

Sesungguhnya, Roem termasuk bagian kecil dari anak-anak Jawa yang beruntung. Tahun-tahun itu merupakan masa dilaksanakannya kebijaksanaan baru penjajah yang lebih memperhatikan bumi putera. Kritik-kritik kaum sosialis dan kaum etisi Belanda yang mulai dilancarkan sejak tahun 1891<sup>10</sup>, telah mendorong lahirnya Kebijakan Baru Program Pemerintah Belanda tentang Hindia. Pada bulan Januari 1901, di depan parlemen, Ratu Wilhelmina mengumumkan tujuan utama Pemerintah jajahan di masa mendatang untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Katanya, bangsa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Hindia, karena eksploitasi yang dilaksanakan sebelumnya telah melimpahkan keuntungan besar kepada Belanda. Dengan perubahan

kebijaksanaan ini, perlahan-lahan pemerintah Hindia Belanda memperluas kesempatan anak Indonesia golongan atas untuk mengikuti pendidikan di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah yang berbahasa Belanda.<sup>11</sup> Roem termasuk salah seorang di antara anak-anak Hindia Belanda yang terpilih memperoleh kesempatan itu.

Dampak perubahan kebijaksanaan ini mulai terlihat atau terasa pada waktu Roem menyelesaikan pendidikannya, baik di HIS, STOVIA maupun AMS. Dampak tersebut memperlihatkan diri sebagai memakai konsep Kahin<sup>12</sup> — *Genesis of the Indonesian Nationalist Movement*. Mereka yang telah menyerap pendidikan Barat mulai menyadari bahwa, masa depan kemerdekaan politik di Indonesia tidak akan punya arti jika tidak diikuti dengan kemerdekaan ekonomi. Dalam mata masyarakat—di mana hampir semua modal dimiliki elemen-elemen nonpribumi—cita-cita Indonesia merdeka yang menguasai kehidupan ekonomi, menjadi penting.<sup>13</sup> Perasaan seperti ini muncul bersamaan dengan tidak baiknya lapangan kerja bagi mereka yang telah terdidik, sehingga menimbulkan kelompok elit yang frustrasi. Diskriminasi bidang pekerjaan, antara kelompok terdidik pribumi dengan Belanda—walau mempunyai titel dan keterampilan yang sama—tetap berlangsung. Gejala-gejala ini merupakan bagian dari proses pembentukan nasionalisme Indonesia.<sup>14</sup>

Munculnya kaum intelektual baru yang menggugat struktur sosial-politik Hindia Belanda merupakan dampak terpenting dari perubahan kebijaksanaan ini. Kelompok intelektual, terutama para pelajar-pelajar Hindia di Belanda bisa berkomunikasi langsung dengan berbagai aliran pemikiran yang sedang berkembang di Eropa, pada tahun 1928-an, terutama Marxis, Leninis dan Sosialisme. Lewat pikiran-pikiran ini, mereka bisa mendapatkan penjelasan

11 John Ingleson, *Jalan ke Pengasingan, Pergerakan Nasionalis Indonesia Tahun 1927-1934*, (Jakarta: LP3ES), hal. 1.

12 George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, (Cornell University Press, 1970), hal. 37-63.

13 Kahin, *Ibid.*, hal. 52.

14 Kahin, *op.cit.*, hal. 53-54.

8 *Sinar Harapan*, 15 Januari 1971.

9 Soemarso Soemarsono, *op.cit.*, 4-5.

10 Sartono Kartodirdjo, *et.al.*, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V, (Jakarta: Dep. P dan K., 1975), hal. 35.

(JIB)<sup>20</sup>, dan mengaguminya, menjadi sering berkunjung ke rumah tokoh PSII itu bersama-sama dengan Kasman Singodimedjo, Soeparno, dan teman lainnya. Hubungan Roem-Salim semakin kental lewat pertemuan-pertemuan semacam ini, juga ceramah-ceramah Islam yang diberikan Salim untuk JIB serta tulisan-tulisannya di surat kabar *Hindia Baru*, tajuk dan mimbar Jum'at.

Keindonesiaan Roem semakin kuat, setelah mendengar pidato Salim pada kongres JIB pertama tahun 1926 di Yogyakarta. Waktu itu Salim menyatakan bahwa betapa masyarakat Hindia terutama kalangan intelektual dicekam di bawah sugesti superioritas Barat. Juga dalam gerakan perlawanan dan usaha melepaskan diri dari dominasi Barat, kita bergerak dan di bawah pimpinan langsung atau tidak langsung, menurut garis yang diberikan Barat.<sup>21</sup> Mungkin, karena itu pula, Roem pernah berkata, bahwa ketika ia dan kawan-kawan aktif di dalam Jong Java dan JIB, mereka umumnya telah menyadari bahwa dengan berorganisasi, mereka kelak menjadi pemimpin bangsa.<sup>22</sup>

Pengaruh Salim kelak menentukan langkah-langkah politik Roem. Dengan kesadaran itulah, Roem giat di JIB, sejak tahun 1925 dan juga sebagai anggota *National Indonesische Papuinderij* (Natupij), organisasi kepanduan JIB. Namun, kegiatan Roem di JIB tidak terlalu lama. Segera setelah menjadi mahasiswa *Recht Hoge School* (Sekolah Tinggi Hukum), Roem melepaskan aktivitasnya di JIB. Sebagai gantinya, bersama Jusuf Wibisono, ia mendirikan *Studenten Islamitische Studie Club*.<sup>23</sup> Bahkan, dalam waktu yang bersamaan, Roem telah aktif di kegiatan politik PSII dalam arti sebenarnya, walaupun sebelum menjadi anggota resmi PSII, Roem telah menjadi Ketua Panitia Kongres PSII di Jakarta.

Roem secara resmi menjadi anggota PSII pada tahun 1932. Sebagai mahasiswa hu-

kum, ia aktif membela nasib atau perkara orang-orang PSII di muka pengadilan negeri pemerintah Belanda. Sebagian besar perkara yang dibelanya menyangkut persoalan tanah partikelir dan sikap tuan tanah yang sewenang-wenang terhadap bawahan. Semua kegiatan ini dilaksanakan bersama-sama dengan Agus Salim.

PSII yang dimasuki Roem, telah mengalami pemudaran radikalismenya. Semangat kooperatif jauh lebih besar dari non-kooperasi. Agus Salim melihat bahwa tekanan-tekanan yang diberikan Belanda terhadap gerakan nasionalisme merupakan sesuatu yang tak terelakkan, dan berpendapat, agar PSII tidak terisolir, haruslah melaksanakan kebijaksanaan kooperasi. Salim tidak mendapat dukungan, akibatnya ia terlempar dari PSII.

Salim yang terlempar dari PSII mendirikan partai baru yang disebut *Penyadar*. Roem ikut di dalamnya bersama-sama dengan A.M. Sangadji dan Soedjono Hardjosudiro. Jabatan Roem pada waktu itu adalah Ketua Komite Sentral Eksekutif (*Lajnah Tanfidziah*), sementara Soedjono, menjabat Komite eksekutif.

Tentu saja partai ini bersifat kooperatif dengan Belanda; dalam arti bahwa kemerdekaan Indonesia tidak harus dicapai dengan radikal, melainkan dengan jalan perundingan. Itulah sebabnya, *Penyadar* mendukung "Petisi Soetardjo" dari Persatuan Pegawai-pegawai *Binnenlands Bestuur* (PPBB). Sebab petisi itu berisi tuntutan yang sejalan dengan sikap Salim dan Roem, yang meminta agar dalam waktu 10 tahun, diadakan konferensi untuk membicarakan Hindia Belanda berdiri sendiri. Dasar tuntutan itu adalah artikel 1 dari *Grondwet* (UUD). Artikel itu menyebutkan bahwa kerajaan Belanda terdiri dari kerajaan Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao. Maksud petisi Soetardjo, meminta Belanda membicarakan soal berdirinya Hindia Belanda tersendiri, masih dalam rangka *Grondwet* tersebut.

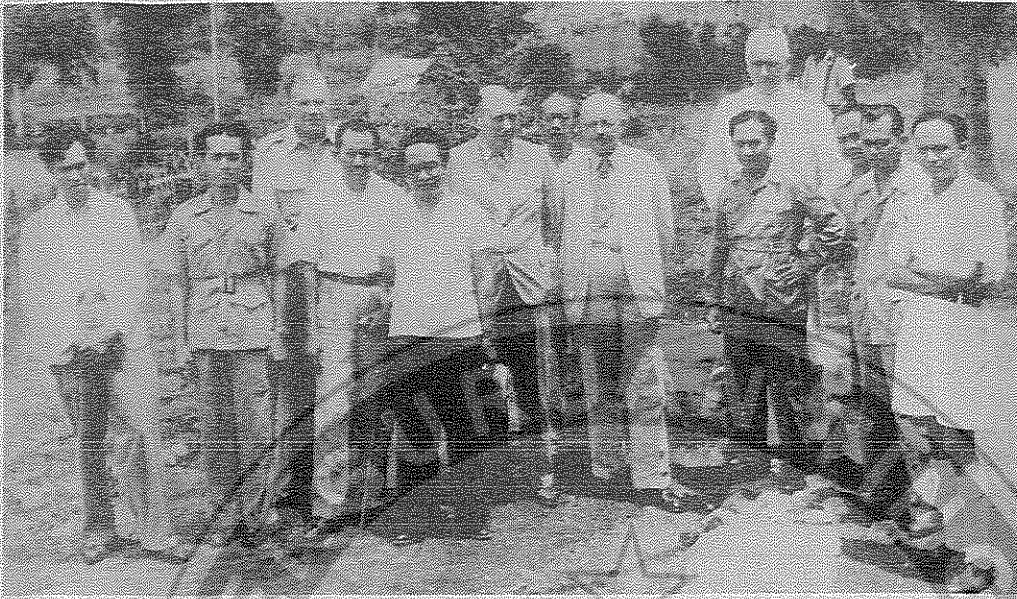
Latar belakang dukungan itu sebenarnya adalah agar *Penyadar* memperoleh legitimasi politik dan landasan bergerak. Ini dilakukan karena menghebatnya penindasan terhadap gerakan kemerdekaan. Jangankan menyebut "merdeka", sebutan "Indonesia" saja dila-

20 Mohammad Roem, "Memimpin adalah Menderita: Kesaksian Haji Agus Salim", dalam Taufik Abdullah, *et al.*, (ed.), *Manusia dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LPSES, 1978), hal. 103-131.

21 Mohammad Roem, *Ibid.*, hal. 122-123.

22 Soemarso Soemarsono, *op.cit.*, hal. 36.

23 Deliar Noer "Jong Islamieten Bond (Persatuan Pemuda Islam)" dalam Soemarso Soemarsono, *Ibid.*, hal. 249.



Perundingan Linggajati – 1946.

rang. Terlebih rapat-rapat anggota partai politik.

Mungkin, dalam situasi inilah Roem melihat pandangan Salim yang realistis. Baginya, dalam penekanan seperti itu cara untuk mencapai kemerdekaan harus diubah, yaitu dengan perundingan bukan secara radikal. Roem pun ikut berunding dengan Tjarda van Starkenborgh Stakhouwer, Gubernur Jenderal Belanda, mengenai masa depan Indonesia. Dalam perundingan itu, Salim mengusulkan kesediaan rakyat Hindia membantu Belanda dalam Perang Dunia ke-II dengan syarat, Indonesia merdeka. Sampai Indonesia merdeka, Tjarda tidak menggubris usul itu. Ketika Jepang masuk tahun 1942, seluruh partai politik dibubarkan, termasuk Penyard. Kendati begitu pengalaman dengan Agus Salim, memberikan arah aktivitas politik Roem sebagai pejuang dan perunding.

## Pejuang yang Realis

Tampaknya dalam konteks Agus Salim inilah, Roem harus dipahami, yakni dalam sikap realistis dan berusaha berdialog dengan kenyataan. Apa yang diperoleh dari Salim oleh Roem lebih dikembangkan. Rumusan pandangan realistis diungkapkan dengan pembentukan pribadi yang bebas dan tidak

terlalu terikat pada kelompok atau organisasi. Bentuk sikap seperti inilah yang kemudian menentukan putusan-putusan politik pribadinya.

Tidaklah terlalu mengherankan, bila Roem, walau menjadi anggota Masyumi, bertindak atas namanya sendiri untuk duduk dalam suatu kabinet yang tidak didukung Masyumi.<sup>24</sup> Tidak ada keterangan, apakah sikapnya ini menimbulkan ketegangan hubungan antara Roem dengan pimpinan Masyumi. Namun yang jelas, sikap semacam inilah yang berlanjut sampai dengan tahun 1968 ketika terpilih menjadi Ketua Umum PMI atau ketika menerima pencalonannya sebagai anggota parlemen dalam Pemilu 1972, walau Natsir telah mengingatkannya.

Faktor yang amat kuat mempengaruhi Roem sebagai diplomat dan perunding bukanlah semata-mata karena bakat atau warisan keterampilan yang diperoleh dari Salim, melainkan karena bentuk pribadi yang bebas. Dengan bentuk itu, membebaskannya dari rasa risih untuk bertindak sebagai perunding, sebab waktu itu, kelompok-kelompok kekuatan perlawanan (ter-

24. Roem duduk dalam Kabinet Syahrir III atas namanya sendiri, bukan mewakili Masyumi, partainya.

hadap Belanda) lebih menekankan perjuangan fisik daripada berunding.

Makna bentukan pribadi yang bebas bagi Roem—yang diejawantahkan untuk lebih memilih lapangan diplomasi atau perundingan dalam tarik menarik kekuatan pro dan kontra perundingan—akan bisa dipahami dengan melihat realitas kekuatan pergerakan sosial dan persenjataan Indonesia pada waktu itu. Dengan melihat situasi yang semacam ini, sedikit-dikitnya Roem bisa ditempatkan dalam perjuangan kemerdekaan penuh yang dapat pengakuan formal dari dunia internasional, khususnya Belanda. Dengan itu pula sekaligus menempatkan perjuangan diplomasi pada lokasi tersendiri dalam perjuangan kemerdekaan.

Sesungguhnya segera setelah Soekarno—Hatta mengumumkan proklamasi kemerdekaan, hampir tidak ada lagi kekuatan-kekuatan bersenjata yang terorganisir dengan rapi, kecuali kekuatan milisi. Pembela Tanah Air (PETA), satu-satunya organisasi bersenjata dengan hirarki yang ketat, dibubarkan beberapa hari setelah proklamasi.<sup>25</sup> Kekuatan bersenjata, praktis tidak cukup kuat melindungi negara yang baru tumbuh ini dari serangan-serangan luar.

Guna mengisi kekosongan inilah, dalam pidato tanggal 23 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan berdirinya Badan Keamanan Rakyat (BKR), di samping Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI)<sup>26</sup>, walaupun dilihat dari segi organisasinya, jelas kekuatan bersenjata ini masih sangat lemah, apalagi karena berdiri tanpa adanya kordinasi yang terpusat. Pembentukan-pembentukan BKR di daerah-daerah diserahkan kepada KNI daerah pula. Keadaan yang tidak menguntungkan ini diimbangi pula oleh belum terbentuknya lembaga pemerintah, sehingga kelompok-kelompok radikal yang menolak keputusan itu membentuk kekuatan sendiri, yang disebut *Komite van Aksi*, yakni gabungan dari Angkatan Pemuda Indonesia (API),

Barisan Rakyat Indonesia (BARA) dan Barisan Buruh Indonesia.<sup>27</sup>

Kekuatan bersenjata ini pun tidak memiliki cukup daya untuk menahan masuknya tentara Serikat, *Southeast Asia Command* di bawah pimpinan Laksamana Lord Louis Mountbatten, yang menimbulkan pertempuran-pertempuran lokal. Baru kemudian disadari perlunya mempersatukan BKR yang dinyatakan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 5 Oktober 1945. Dari sini berdirilah Tentara Keamanan Rakyat (TKR).

Dalam kemelut ini, TKR hampir tidak punya kesempatan untuk mengembangkan diri, sementara tentara Belanda terus menerus didatangkan. Mungkin karena ini pula, pihak TKR juga bersedia maju ke meja perundingan—sebagai hasil pertemuan "PM Syahrir—Lord Killearn"—pada tanggal 17 September 1945. Pertemuan ini mengalami jalan buntu. Namun, sikap mau berunding dari pihak TKR menunjukkan betapa pertempuran fisik saja bukan satu-satunya jalan perjuangan.

Kegagalan persetujuan gencatan senjata ini punya implikasi yang cukup luas terhadap sistem pertahanan Indonesia dan sekaligus semakin membuktikan bahwa, perjuangan diplomasi merupakan alternatif satu-satunya yang harus ditempuh. Segera setelah Belanda melaksanakan penafsiran sepihaknya terhadap perjanjian Linggajati dan perjanjian Renville, serbuan tentara Belanda hampir-hampir tak tertahan lagi. Yogyakarta, Ibukota Negara RI, setelah dihujani bom pada tanggal 19 Desember 1948, jatuh ke tangan Belanda. Soekarno, Hatta, Syahrir, Roem, Ali Sastroamidjojo dan lain-lain ditawan. Sampai di sini, realitas Indonesia dihadapkan pada suatu kenyataan; melanjutkan perjuangan fisik—dengan resiko kedaulatan penuh masih harus diperjuangkan dalam masa yang belum bisa ditentukan—atau bersedia berunding, dengan segala kemungkinan yang tersedia.<sup>28</sup>

27 Komite van Aksi ini bermarkas besar di Jl. Menteng 31, Jakarta. Tokoh-tokohnya antara lain Adam Malik, Sukarni, M. Nitimihardjo, dan lain-lain.

28 Dengan jatuhnya Yogyakarta, hampir tidak ada kekuasaan efektif lainnya bagi Republik Indonesia, kecuali Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatera Barat dan Aceh, yang tidak lagi dikuasai Belanda.

25 Onghokham, "Soekarno antara Mitos dan Realitas", dalam Taufik Abdullah *et al.* (ed.), *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*, (Jakarta: LPSES, 1978), hal. 38-39.

26 Sartono Kartodirdjo, *et al.*, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid VI, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), hal. 30.

Dalam hubungan inilah dimensi perjuangan diplomatik menjadi amat penting, sebab di bawah dominasi kekuasaan Belanda yang menyeluruh, hanya tinggal dua kekuatan adalah; opini dunia terhadap agresi Belanda I dan II serta kelompok-kelompok tertentu di dalam negeri yang mampu memanfaatkan kekuatan opini tersebut untuk kepentingan perjuangan. Roem hampir seluruhnya berada dalam dunia ini. Debut pertama diplomasi-nya berlangsung ketika kekuasaan Republik Indonesia semakin lama semakin tergerogoti, ketika ia menerima jabatan Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Syahrir III, ia sangat sadar bahwa wilayah kekuasaan Republik Indonesia yang efektif hanyalah di Yogyakarta dan di tanah Aceh. Alasan ini mendorong Roem menerima atau bersedia menjadi anggota delegasi perjanjian Linggajati, walau Masyumi, partainya sendiri menolak perjanjian tersebut.

Perjuangan diplomasi ini merupakan jalan panjang yang mendebarkan, sebab setiap tahap perundingan melahirkan kekecewaan walau hasil yang dicapai dapat dijadikan dasar berpijak dalam perundingan selanjutnya. Perundingan pun merupakan jalan bertahap menuju kemerdekaan. Perundingan Linggajati merupakan kelanjutan dari perundingan-perundingan informal lainnya, termasuk antara Soekarno-Hatta—atas desakan Inggeris<sup>29</sup>—dengan Belanda, atau antara Syahrir sebagai Perdana Menteri dengan Dr. van Mook sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan Christison, wakil dari tentara Sekutu. Perundingan Linggajati yang lebih dulu diawali dengan "Pra perundingan" di Jakarta, pada tanggal 7-14 Oktober 1946, melahirkan gencatan senjata yang memungkinkan pertemuan berikutnya.

Betapapun perjanjian Linggajati diliputi kekecewaan<sup>30</sup>, kondisi struktural mengharuskan perjuangan diplomasi berjalan terus. Serangan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia yang membangkitkan amarah dunia

menyebabkan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB menyerukan supaya permusuhan di Indonesia dihentikan dan diselesaikan dengan satu perantara, atau cara lain yang damai. India, Australia dan Amerika mendesak campurtangan PBB di Indonesia. Australia mengecam Belanda dengan pelanggaran perdamaannya, sementara Syahrir diberi kesempatan di Dewan Keamanan PBB untuk mengajukan pendapat Indonesia menyelesaikan keadaan tersebut. Atas prakarsa Amerika Serikat, pada tanggal 18 September 1947 lahirlah Komisi Tiga Negara (KTN) yang dibentuk PBB.<sup>31</sup>

Hampir bersamaan dengan tekanan-tekanan internasional itu, di Indonesia terjadi perubahan-perubahan politik yang menentukan nasib Roem dalam dunia diplomasi. Kegagalan perjanjian Linggajati telah menimbulkan krisis kepemimpinan Syahrir. Amir Syarifuddin muncul sebagai Perdana Menteri baru. Pada tanggal 13 November 1947, Masyumi yang sebelumnya menolak duduk dalam Kabinet, menerima seruan Amir Syarifuddin untuk memperkuat kabinetnya.<sup>32</sup> Roem yang sebelumnya ikut jatuh bersama Syahrir muncul kembali sebagai Menteri, mewakili Masyumi.

Dalam kabinet Amir Syarifuddin inilah, atas prakarsa KTN usaha-usaha perundingan Indonesia-Belanda dilaksanakan kembali. Perundingan ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal Renville yang kemudian dikenal sebagai "perjanjian Renville", di mana Roem ikut serta sebagai anggota.<sup>33</sup> Keikutsertaan dalam perundingan

31 KTN ini merupakan suatu panitia perdamaian PBB untuk penyelesaian sengketa Indonesia-Belanda. Pembentukannya dilakukan dengan cara masing-masing pihak yang bersengketa mengusulkan seorang anggota. Dan kemudian, dua anggota yang telah ditunjuk tersebut menunjuk satu anggota tambahan. Indonesia memilih Australia, Belanda memilih Belgia. Lalu keduanya memilih Amerika.

32 Tampaknya alasan dukungan Masyumi adalah karena diperlukannya kabinet yang kuat setelah agresi militer Belanda.

33 Selain Roem, delegasi Indonesia dipimpin Amir Syarifuddin, Dr. Sukiman (Masyumi) dan Ali Sastroamidjojo (PNI), masing-masing sebagai wakil ketua Anggotanya adalah Dr. J. Leimena, Latuharhary, T.B. Simatupang. Sementara dari Belanda, diketuai oleh Abdulkadir Widjojatmodjo, Jhr. H.T.L. K. van Vredenburg. Dari KTN Dr. Frank

29 Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*, (Cornell University Press, 1962), hal. 9.

30 Sehari sebelum penandatngannya, 24 Maret 1947, Belanda menyerbu Mojokerto dan menduduki Kriyan. Seruan ini menjatuhkan Kabinet Syahrir III dan menaikkan Amir Syarifudin ke kursi Perdana Menteri.

Linggajati tetap mengikat Roem untuk terus menekuni bidang ini, sehingga setelah terjadi krisis Kabinet Amir Syarifuddin<sup>34</sup> dan dibentuk Kabinet baru di bawah pimpinan Hatta, Roem ditunjuk sebagai Ketua delegasi Indonesia dalam perundingan-perundingan selanjutnya. Kabinet baru ini menca- nangkan 4 pasal program, yaitu 1. Berunding dengan Belanda atas dasar persetujuan Renville; 2. Meningkatkan pembentukan Indonesia Serikat; 3. Rasionalisasi tentara dan ekonomi; 4. Pembangunan fisik akibat kerusakan-kerusakan pendudukan Jepang.

## Roem sebagai Perunding

Dalam perundingan kali ini Roem menghadapi persoalan yang paling berat. Belanda semakin yakin bahwa periode ini merupakan saat-saat menentukan apakah Belanda bisa kembali menguasai Indonesia sebagai daerah jajahan, atau lepas sama sekali untuk selamanya, karena Indonesia tidak lagi berdiri sendiri. Besarnya tekanan opini dunia serta semakin ekspansifnya usaha-usaha diplomatik Indonesia ke luar negeri semakin mempersukar Belanda untuk berkuasa kembali.

Belanda mencoba bertahan dengan pendapatnya dalam perundingan yang berlangsung pertengahan Maret 1948. Belanda bersikeras mendirikan negara-negara boneka, sementara Indonesia melanjutkan diplomasi luar negerinya. Demikian kuatnya Belanda bertahan, sehingga ketegangan hubungan bukan hanya terjadi antara Indonesia Belanda, tetapi juga antara Belanda dengan KTN. Padahal salah satu negara anggota, adalah Belgia yang ditunjuk Belanda.

Kerasnya sikap Belanda ini juga ada hubungannya dengan pergeseran kelompok-kelompok kekuasaan di negeri Belanda sendiri. Juli 1948, kekuatan kaum kanan Belanda semakin membesar, dan mendesak kelompok kiri. Dr. Drees dari Partai Buruh yang terpilih menjadi Perdana Menteri,

Graham (AS), Richard C. Kirby (Australia) dan Paul van Zeeland (Belgia).

<sup>34</sup> Krisis ini terjadi karena kemudian Masyumi dan PNI menganggap hasil perjanjian Renville terlalu mengalah. Keduanya memutuskan dukungannya terhadap Amir Syarifuddin. Pada tanggal 23 Januari 1948, ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden.

ternyata tidak cukup tangguh mempengaruhi tekanan-tekanan kaum kanan. Situasi ini semakin dipertegang dengan naiknya Dr. Emmanuel M.J.A. Sassen sebagai Menteri Seberang Lautan. Naiknya Sassen mempengaruhi tekad Belanda dalam perundingan di Indonesia.

Sementara PBB tidak berhasil menembus kemacetan<sup>35</sup>, situasi politik di Indonesia pun semakin keruh. PKI dan Front Demokrasi Rakyat (FDR) yang gagal menjatuhkan Kabinet Hatta, menggunakan kegagalan Renville sebagai alat untuk berkuasa. Pada tanggal 18 Desember 1948, PKI dan FDR melakukan pemberontakan di Madiun di bawah pimpinan Musso, Amir Syarifuddin, Setiadji, dan lain-lain. Pemberontakan ini justeru terjadi di tengah-tengah blokade Belanda yang semakin ketat.

Bersamaan dengan itu, di dalam anggota delegasi KTN pun terjadi perubahan. Mehre Cochran menggantikan Graham. Atas nama PBB, Cochran membuat usul baru yang sebenarnya menguntungkan Belanda<sup>36</sup>, namun ditolak Belanda, karena hak Komisi Agung Belanda tidak termasuk hak mengirimkan tentara-tentara Belanda ke wilayah mana pun yang dikehendaki. Roem dan kawan-kawan tentu saja menolak usul tersebut, sebab bukan hanya mengembalikan kekuasaan Belanda, tetapi sekaligus menghapuskan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dinamika pertumbuhan situasi inilah yang mendorong Belanda melakukan agresi kedua dan mencaplok Yogyakarta, daerah inti pemerintahan Indonesia. Dalam pencaplokan ini Presiden dan Wakil Presiden memilih menyerah.<sup>37</sup> Praktis seluruh pemerintahan

<sup>35</sup> Untuk menembus kemacetan, Du Bois—dari AS yang menggantikan Graham, dan Thomas K. Crichtley (Australia) mengajukan usul-usul sebelumnya. Namun ditolak Belanda. Lalu pada tanggal 1 Juli 1948, PBB bersidang mengenai Indonesia. Sayangnya, justeru Amerika yang menolak usul Du Bois, yang diajukan Cina. Akibatnya, terjadi kemacetan total dalam perundingan.

<sup>36</sup> Usul Cochran adalah pembentukan Pemerintahan Federal Indonesia yang dikepalai oleh Komisaris Agung Belanda dengan kekuasaan yang amat luas. Ia dapat memveto Badan Legislatif dan wewenang untuk memerintah.

<sup>37</sup> Soekarno, Agus Salim dan Syahrir ditawan di Berastagi. Sementara Hatta, Roem, Ali Sastroamidjojo, Asaat, Pringgodigdo dan Komodor Surjardarma di Bangka.

Indonesia runtuh—kecuali PDRI yang dipimpin Syafrudin Prawiranegara di pedalaman Sumatera Barat.

Serangan Belanda itu tidak menghasilkan apa-apa, kecuali kemenangan militer. Reaksi dunia terhadap peristiwa ini semakin keras. Tiongkok, Kuba, Amerika dan Norwegia mengajukan resolusi ke PBB pada tanggal 19 Januari 1949. Resolusi ini lebih disempurnakan dalam Konferensi New Delhi. Atas desakan Amerika Serikat, tanggal 28 Januari 1949, PBB berhasil memutuskan resolusi. Resolusi itu serta merta menggoncangkan politik Belanda. Sassen, Menteri Seberang Lautan, jatuh dan diganti J.H. van Maarseveen. Perubahan politik di Belanda dan pergantian Menteri Seberang Lautan mengubah pula pandangan perundingan dengan Indonesia. Perundingan harus terus dilaksanakan. Untuk itu, tempat tahanan Soekarno dan Agus Salim dipindahkan dari Berastagi ke Bangka, agar mereka bisa berhubungan dengan Hatta dan kawan-kawan, untuk membahas rencana perundingan Beel.<sup>38</sup> Beel bermaksud mengundang PM Hatta langsung ke Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Namun usul ini ditolak Soekarno-Hatta, jika kedudukan Republik Indonesia tidak dipulihkan terlebih dahulu.

Dalam keadaan ini, Roem, sebagai Ketua Delegasi, dihadapkan pada dilema, sebab Soekarno dan Hatta, menyetujui KMB, dengan catatan kedudukan RI dikembalikan ke Yogyakarta, Ibukota Negara. Padahal, sebelum ditawan, Presiden telah memberikan mandat kepada Syafrudin Prawiranegara menjadi Presiden PDRI, sehingga secara formal, PDRI lah yang berhak melaksanakan perundingan. Masyumi, partai Roem, mendukung pendapat ini. Bahkan Natsir, Dr. Darmasetiawan dan Dr. Halim sengaja datang ke Bangka untuk mendesak pendapat ini. Namun Roem memihak Soekarno-Hatta, dan tidak mendukung pendapat Masyumi. Sikap Roem ini terbukti pada penolakannya atas undangan Cochran untuk memulai perundingan pada tanggal 30 Maret 1949. Sama dengan Soekarno-Hatta, Roem bersikap bahwa pemulihannya kedaulatan Pemerintah RI ke Yogyakarta merupakan syarat

memulai perundingan. Sebab, ujar Roem, tanpa itu akan menimbulkan kesalahpahaman. Roem hanya bersedia membicarakan segi-segi praktis secara detil bagi pemulihannya RI, lebih dulu di Yogyakarta.<sup>39</sup>

Ketika perundingan—yang kemudian terkenal dengan Roem-Royen Statement—berlangsung pada tanggal 14 April 1949, Roem mengecam serangan-serangan Belanda. Dalam pidatonya Roem menyatakan, agresi Belanda yang kedua telah mengakibatkan hilangnya sisa kepercayaan rakyat Indonesia bagi berhasilnya suatu perundingan damai.

Sesungguhnya, perundingan yang berlangsung di Hotel Des Indes, Jl. Molenvliet<sup>40</sup> merupakan suatu perundingan yang sangat menentukan masa depan bangsa Indonesia yang berdaulat, sebab pertempuran lokal yang hanya mampu meletup-letup di daerah pinggir, sementara Pusat telah dikuasai Belanda. Roem-Royen Statement melahirkan suatu keadaan yang jika dilihat dari perspektif perjuangan militer sangat sukar dicapai dalam waktu singkat. Dalam hal ini, statement Royen menyatakan: 1. Pemerintah Belanda setuju bahwa Pemerintah RI harus bebas dan leluasa melaksanakan jabatan yang sepatutnya dalam suatu daerah yang meliputi Karesidenan Yogyakarta. 2. Pemerintah Belanda menguatkan sekali lagi kesanggupan untuk menjamin penghentian segera gerakan-gerakan militer dan membebaskan segera tanpa syarat tahanan politik yang ditangkap sejak tanggal 17 Desember 1948 dalam Republik Indonesia.<sup>41</sup> Segera setelah persetujuan ini, proses pencapaian kedaulatan Republik Indonesia berjalan lebih lancar. Pada tanggal 10 Juni 1949, ditetapkan pertemuan antara Indonesia dan Belanda, yang diikuti oleh negara federal dan KTN. Pada tanggal 22 Juni 1949, Royen mengumumkan penarikan pasukan Belanda.<sup>42</sup> Praktis, fungsi Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan dalam Kabinet Hatta, diaktifkan kembali.

39 Soemarso Soemarsono, *Roem Sebagai Perunding*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hal. 135.

40 Sekarang diganti dengan Jl. Gajah Mada. Tempat tersebut kini telah menjadi pertokoan Duta Merlin.

41 Keterangan Roem-Royen, 7 Mei 1949.

42 Penarikan pasukan Belanda berjalan lancar, dari tanggal 22-30 Juni

38 Dr. Beel merupakan Wakil Tertinggi Ratu Belanda di Indonesia.



Selanjutnya, giliran Soekarno-Hatta dielu-elukan rakyat Yogyakarta, sekembali dari tahanan mereka di Bangka, tanggal 5 Juli 1949, sebagai hasil karya Roem.<sup>43</sup> Dalam hal ini, dengan pulihnya Pemerintah RI, pada tanggal 13 Juli, Syafrudin Prawiranegara secara resmi menyerahkan kembali kekuasaannya sebagai Presiden PDRI kepada Presiden dalam sidang kabinet pertama, setelah pulihnya keamanan.

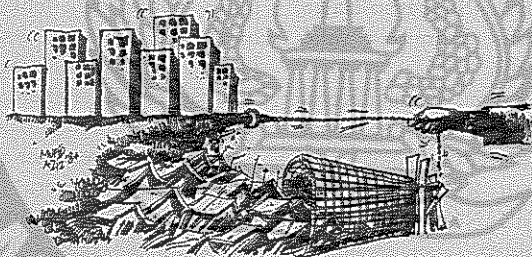
Dalam konteks inilah, medan perundingan dan Roem harus dipahami. Sebab setelah menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, Lovink, Wakil Ratu Belanda di Indonesia, bersama Roem berangkat ke lapangan terbang Kemayoran untuk kembali ke Belanda. Kendaraan yang membawa mereka ke Kemayoran masih mengibarkan bendera Tiga Warna. Pulang dari Kemayoran kendaraan Roem dihiasi dengan bendera Merah Putih yang

43 Tapi Roem tidak ikut serta. Sebab ia harus berada di Jakarta untuk mempersiapkan penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia.

berkibar-kibar dengan lincahnya, demikianlah Soemarmo Soemarsono melukiskannya dengan indah.

Lovink pergi, setelah Konferensi Meja Bundar usai pada tanggal 22 November. Bersamaan dengan keberangkatan itu, Hatta terbang ke Nederland untuk menerima pengakuan kedaulatan *de jure* dari Belanda. Berdasarkan KMB inilah—setelah diselingi munculnya Republik Indonesia Serikat (RIS) yang hanya berumur 7 bulan—Republik Kesatuan Indonesia bisa dicapai.

Bahwa perkembangan Republik Indonesia dewasa ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat adalah benar. Namun kemajuan-kemajuan itu harus tegak pada pembentukan landasan yang dirintis secara perlahan dan bertahap melalui periode perundingan yang diselingi hingar-bingarnya pertempuran di daerah pinggiran. Roem hampir sepenuhnya berada dalam dunia diplomasi. Suatu dunia nonpersenjataan yang ikut memberikan andil tidak kecil terhadap kemerdekaan Indonesia, justeru pada saat-saat senjata fisik Indonesia tidak lagi bisa berbicara banyak.



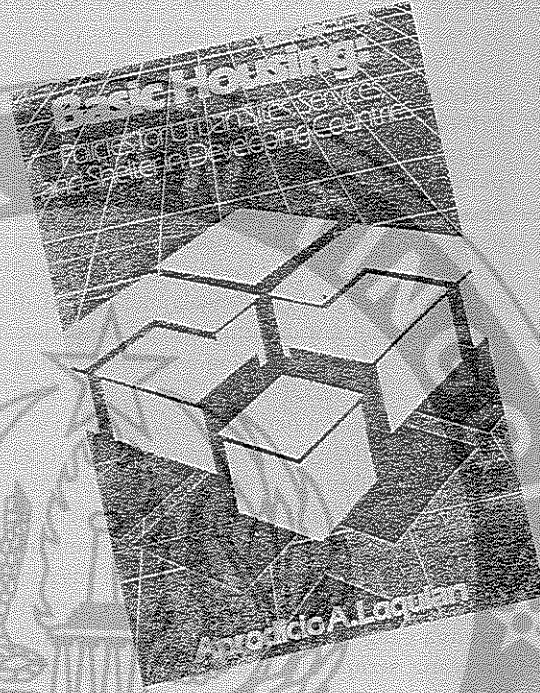
## Menengok Proyek Pembangunan Perumahan

Aprodicio A. Laquian, *Basic Housing: Policies for Urban Sites, Services and Shelter in Developing Countries* (Ottawa: International Development Research Centre, 1983). 163 halaman, tanpa indeks.

Pembangunan Indonesia menurut Soetjip-to Wirosardjono (lihat "Masalah Kependudukan di Indonesia", *Prisma* No. 2, Februari 1982, halaman 16-25), dalam jangka panjang akan selalu dibayangi oleh masalah kependudukan dengan segala tata kaitan persoalannya, baik ditinjau dari jumlah, penyebaran, pertumbuhan maupun sifat-sifat demografi lain penduduk Indonesia.

Di Jakarta, misalnya, telah menjadikan dirinya sebagai simbol dari pembangunan di bidang-bidang perdagangan, industri, seni dan budaya, politik dan lain sebagainya. Hal ini terlihat secara nyata dengan berduyun-duyunnya masyarakat dari kota-kota kecil ke ibukota negara kita, yang konon dapat memberikan kelangsungan hidup bagi warganya. Kecenderungan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat saja, yang mengakibatkan kawasan perkotaan yang masif tersebut akan menjadi sangat terasa gerah. Laju pertumbuhan perkotaan akan menjadikan kota-kota besar secara drastis semakin sempit, dikaitkan dengan ruang, jasa perkotaan yang melayaninya dan tentu saja juga perumahan.

Fenomena-fenomena yang lazim timbul di negara-negara sedang berkembang tersebut yang mendorong Dr. Aprodicio A. Laquian menulis buku ini. Dengan dana dari Pusat Penelitian untuk Pembangunan Internasional dan Bank Dunia, Laquian mengadakan penelitian yang sangat mendalam, yang salah satu tujuannya adalah menguji dampak Proyek Pembangunan Perumahan terhadap



masyarakat yang tinggal di kawasan proyek, masyarakat di sekitarnya yang dipengaruhi, struktur pelayanan jasa perkotaan, dan terhadap kota besar secara keseluruhan.

Dikemukakan juga oleh penulis buku ini, bahwa perumahan dasar adalah merupakan proses di mana keluarga termiskin di perkotaan berhak mendapatkan tempat berteduh untuk perlindungan dan pelayanan yang semestinya. Adalah suatu pernyataan yang sangat manusiawi sekali dan menyentuh kalbu masyarakat kecil.

Menyadari hal-hal demikian, di Indonesia, jauh-jauh sebelumnya Pemerintah (semenjak Kabinet Pembangunan III), Kepala Negara merasa perlu mendudukkan salah seorang pembantunya menempati posisi sebagai Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat. Langkah pemerintah ini maju sekali dan patut mendapatkan sambutan yang hangat, walaupun dalam upaya ini pemerintah mendapatkan *loan* dari badan-

badan internasional yang nota bene *loan* tersebut harus dibayar oleh anak cucu kita kelak di kemudian hari.

Betapapun demikian, masih banyak masyarakat kita yang masih tetap *complain*. Kenapa demikian? Bukanlah rahasia umum lagi bahwa orang-orang yang menempati perumahan tersebut sebagian besar adalah berasal dari kalangan menengah ke atas, yang seharusnya merupakan hak bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang begitu mendesak kebutuhannya.

Dengan membaca tulisan buku ini, para pembaca yang budiman diajak untuk menyimak buah pikiran yang dituangkan oleh penulis buku ini. Tulisan-tulisan dalam buku ini pada dasarnya merupakan satu monografi mengenai pengalaman-pengalaman aktual di dalam perumusan dan implementasi kebijaksanaan-kebijaksanaan yang mendasar untuk meningkatkan taraf hidup kaum miskin di perkotaan. Dalam penulisan ini, penulis yang dibantu oleh beberapa tim peneliti di El Salvador, Filipina, Senegal dan Zambia bersama-sama mengadakan proyek penelitian untuk mencapai suatu kesimpulan yang sangat besar sekali artinya. Informasi juga saling dipertukarkan dengan para tim peneliti lainnya yang mengadakan penelitian-penelitian yang serupa di Indonesia, Jamaica dan Kenya.

Mendapatkan kriteria batas kemampuan merupakan salah satu pekerjaan yang paling penting di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan perumahan dasar, karena dengan demikian kriteria tersebut dapat menentukan si penerima warisan (*beneficiaries*) akhir proyek ini (halaman 37).

Di samping pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi taraf hidup rumahtangga-rumahtangga berpenghasilan rendah, juga keteraturan maupun ketidakteraturan arus pendapatan haruslah dipahami secara lebih seksama, guna mendapatkan informasi tentang pendapatan dan pengeluaran yang lebih cermat pula. Hal ini dijadikan bahan pertimbangan, karena sebagian besar pengukuran (tolok ukur) batas kemampuan didasarkan atas *amortisasi* bulanan yang tidak beraturan, meskipun arus pendapatan nampaknya tidaklah beraturan di kalangan kaum miskin.

Dikemukakan pula dalam pendekatan kemandirian (*self-help*), haruslah melibatkan

juga inisiatif, keterampilan pemeran serta dan sumberdaya dalam mendirikan suatu bangunan rumah. Ironinya, sampai saat ini pengalaman dalam urusan perumahan dengan gotong-royong (*mutual-aid*) dan kemandirian telah mengungkapkan bahwa pengharapan yang tinggi yang dihasilkan oleh kepustakaan manapun, belumlah dijumpai mengenai program perumahan dasar yang sebenarnya (hal. 51).

Yang menarik dalam topik mengenai konsolidasi perumahan ini adalah kriteria pemilihan proyek. Di sini dikatakan, bahwa pendapatan keluarga merupakan salah satu unsur penting dalam kriteria pemilihan tersebut, tetapi sasaran tujuan yang penting dalam proyek perumahan dasar ini adalah dimungkinkannya kelompok-kelompok berpendapatan lebih rendah lebih mudah mencapainya. Dengan demikian, *trade-off* harus diperoleh antara pemilihan kelompok-kelompok berpendapatan lebih tinggi dan permasalahan *rate* konsolidasi perumahan yang lebih rendah (hal. 61).

Sebagaimana tipe-tipe perumahan yang telah dikenal di Indonesia selama ini, penulis juga memberikan ulasan cukup mendetail mengenai kontroversi dan masalah-masalah yang menjadi perhatian dalam undang-undang bangunan dan standar-standar perumahan. Di sini penulis mengungkapkan bahwa dalam merencanakan dan mengelola proyek-proyek perumahan dasar, telah muncul sejumlah bidang secara berulang-ulang. Di antaranya yang paling lazim adalah ukuran petak tanah, ukuran dan disain tempat kediaman, bahan bangunan, kemudahan sanitasi, standar kepadatan dan penggunaan lahan campuran dan tempat kediaman sebagai tempat berteduh. Nampaknya para ahli perumahan juga menghadapi persoalan ini dan memecahkan permasalahan yang mereka bawa dengan berbagai cara. Betapapun demikian, tak ada undang-undang dan standar yang dapat diterima secara universal, namun terdapat kesamaan dalam sifat permasalahan dan logika pemecahan masalah setempat tersebut (hal. 73).

Sisi lain dari konstruksi dan aktivitas-aktivitas lain dalam proyek pembangunan perumahan dasar ini adalah akan terciptanya kesempatan peluang kerja dan tentunya juga

perbaikan situasi perolehan pendapatan para pemeran serta. Di El Savador, kontribusi terbesar bagi kesempatan kerja dan pendapatan, berasal dari tenaga kerja yang diberi gaji dengan mengikutsertakan para keluarga selama fase kemandirian proyek sebesar 38,6 persen dari pendapatan yang diperoleh. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai perkiraan pendapatan dan peluang kesempatan kerja di El Savador pada tahun 1980 menunjukkan, bahwa konstruksi satu rumah, masing-masing menghasilkan pendapatan sebesar \$ 497 dan menciptakan 6,4 orang-bulan kerja (hal. 88-89).

Proyek pembangunan perumahan dasar ini juga mempunyai pengaruh dan dampak yang positif terhadap taraf hidup masyarakat, kualitas tempat bernaung dan pelayanan jasanya dan juga terhadap nilai lahan di sekitar kawasan proyek tersebut. Hasilnya memang nampak nyata sekali bila dibandingkan dengan kondisi kehidupan pada kawasan perkampungan yang miskin dan kotor/penghuni liar, di mana masyarakat terbiasa hidup, kini keadaan mereka di lokasi proyek umumnya sangat jauh lebih baik (misalnya, di lokasi sebelum dan sesudah diperbaikinya saluran *drainase* dan lorong perkampungan dalam Program Perbaikan Kampung di Jakarta, juga diperlihatkan hasilnya dalam buku ini). Namun dipertanyakan pula, apakah dampak positif dalam pelaksanaan proyek tersebut akan berlanjut terus di masa-masa mendatang (hal. 143-144). Nah, di sini kita semua ditantang oleh Laquian untuk membuktikannya. Hanya perputaran waktu sajalah yang akan menjawabnya kelak!

Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, biasanya mempunyai berbagai peranti kebijaksanaan, yang memberi batasan peranan pemerintah dan juga sektor swasta dalam menyediakan tempat-tempat kediaman dan pelayanan-pelayanan jasa. Contoh yang jelas—sebagaimana dilansir media massa—kebijaksanaan tersebut sedikit banyak berkaitan dengan statemen berapa banyak rumah yang diperlukan per tahunnya, badan-badan apa saja yang harus melakukannya, dan berapa banyak upaya tersebut dikenakan biaya; lain-lain dokumen yang komprehensif yang mencakup perspektif jangka pendek dan jangka panjang, analisa kebutuh-

an dan permintaan akan rumah yang canggih, perkiraan investasi pembangunan perumahan dan yang lebih penting lagi adalah mengenai tanggungjawab kelembagaan yang ada.

Memang menarik mengulas buku ini yang gagasan awalnya dibahas dalam suatu pertemuan yang diadakan di San Salvador, El Savador, pada bulan Juli 1975. Dalam pertemuan tersebut dibahas tujuan penelitian, disain penelitian tentatif dan peran serta para peneliti setempat dan peneliti asing. Khususnya, penelitian ini didasarkan atas keterlibatan penulis sendiri pada proyek-proyek pembangunan perumahan di empat negara, yaitu yang meliputi Filipina, Kenya, Jamaica dan Indonesia sendiri.

Buku ini pada dasarnya, menurut penulisnya, ditujukan kepada para pembuat kebijaksanaan dan para administrator pemerintahan, di samping para peneliti dan pihak-pihak lain yang berminat, termasuk saya tentunya.

Tambahan pula, penulis juga menyelipkan himbauan seorang anggota dari Dewan Kota Lusaka mengenai prinsip-prinsip humanisme Zambia. Kutipannya sebagai berikut: "*Under colonial rule, only white people lived in town, whereas Africans lived in their huts in the native quarters outside the city limits. African were separated from their families who remained in the villages. Jobless Africans were not allowed in the city. We are independent now. We should live in good houses with our families*".

Artinya: "Di bawah kekuasaan pemerintah kolonial, hanya orang-orang kulit putih saja yang tinggal di kota, sementara orang-orang Afrika tinggal di gubug-gubug di daerah asli di luar perbatasan kota. Orang-orang Afrika dipisah-pisahkan dari keluarga mereka yang tinggal di kampung-kampung. Mereka yang tidak punya pekerjaan tidak diizinkan tinggal di kota. Kami merdeka sekarang. Kami ingin tinggal di rumah-rumah yang bagus bersama segenap keluarga kami."

Di mana-mana di bagian muka bumi ini, diskriminasi memang menyakitkan . . . . .

SENTOT SUBAGYO \*  
Jl. R.A. Kartini 3A  
Malang.

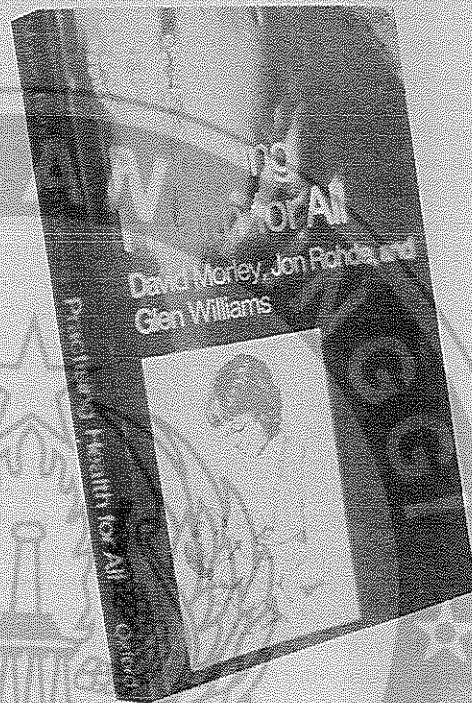
\* Penulis tinjauan ini adalah staf Proyek Kali Konto, Malang.

# Kesehatan untuk Semua

Oxford Medical Publications; ed. David Morley, Jon E. Rohde, Glen Williams; *Practising Health for All*, (Oxford: Oxford University Press 1983), 333 halaman.

Masalah yang hendak diajukan oleh buku ini tersimpul dalam salah satu kalimatnya yang berbunyi: "... *health for all need not to be an impossible dream*. (hal. v). Dengan kalimat tersebut para penyunting buku ini hendak menegaskan adanya dua kemungkinan yang sama-sama terbuka bagi masalah yang satu dan sama, yaitu *health for all*, khususnya bagi Dunia Ketiga. Kemungkinan pertama, *health for all* bukanlah impian yang tak mungkin tak terwujudkan; kemungkinan kedua, *health for all* memang suatu kemustahilan. Mengapa? Karena demi *health for all* dituntut *kemauan* dan *kemampuan* memandang dan menanggapi masalahnya secara struktural dan menyeluruh. Masalah kesehatan, manakala pembicaraan telah sampai taraf "kesehatan untuk semua", bukan lagi sekedar masalah yang terdapat di dalam kamar praktek dokter dan cukup dirumuskan dalam beberapa patah "kata sandi" di atas resep. Bukan juga sekedar masalah pemandangan memilukan di bilik-bilik Puskesmas yang pengap, atau di ranjang-ranjang rumah sakit yang pucat pasi. Demi "sehat bagi semua", maka perlu juga ditanggulangi masalah-masalah seperti air minum, gizi, perumahan rakyat, sanitasi, pendidikan, dan lain-lain . . . , bahkan pun masalah *landreform* dan hak asasi.

Demikianlah. Memandang kesihatan sebagai masalah berdiri sendiri yang bisa ditangani secara tambal sulam, memang akan berakhir pada satu kemungkinan belaka; bahwa "sehat bagi semua" hanyalah sebuah selogan kosong. . .



## Kesenjangan

Senjang kesehatan penduduk bumi belahan utara dan selatan memang teramat lebar. Di selatan, di negara-negara berkembang yang menderita itu, 6-25 anak dari tiap 100 kelahiran mati sebelum mencapai umur 1 tahun, seorang dari setiap 4 orang anak menderita kekurangan gizi, dan umur rata-rata pada umumnya adalah 30 persen lebih pendek ketimbang sesamanya yang hidup di belahan utara. Angka-angka tersebut memang tidak berlaku bagi seluruh penduduk di belahan selatan. Kira-kira 10-20 persen di antara mereka merupakan lapisan istimewa yang harus dikecualikan, karena keadaan hidupnya yang di atas rata-rata, sehingga mampu membayar dokter dan apotik. Mereka biasanya tinggal di kota-kota. Dan justru di sinilah, di kalangan mereka itulah, "praktek kesehatan" Dunia Ketiga berlangsung. Justeru di daerah dan di kalangan,

di mana fasilitas serba tersedia untuk bisa hidup sehat.

Di kotalah, di tengah 10-20 persen penduduk merekalah, segala fasilitas tersedia, karena memang seolah-olah bagi mereka itulah pula pelayanan diberikan: dokter, apotik, rumahsakit, rumah bersalin, peralatan serba lengkap untuk menyelidiki segala penyakit apa pun, dan sebagainya dan lain-lainnya.

Di Tanzania, yang menamakan dirinya sebagai negara sosialis itu, 60 persen dari seluruh anggaran kesehatan (1978/79) tersedia untuk pelayanan rumah sakit, hanya 19 persen daripadanya tersedia untuk puskesmas dan obat-obatan. Sementara itu hanya 14 persen dari jumlah seluruh penduduk tinggal di kota (hal. 58/9). Maka angka-angka tersebut tak lain menjadi berbicara: 60 persen anggaran kesehatan diberikan untuk 14 persen penduduk kota, 19 persen anggaran kesehatan tersedia untuk 86 persen penduduk desa . . .

Negara Dunia Ketiga semuanya bercorak agraris dan non industrial. Lahan tanahnya tidak hanya digunakan untuk menyediakan kebutuhan pangan mereka sendiri, tetapi juga untuk menciptakan devisa melalui misalnya: kopi, gula, cokelat, beras, tembakau, daging, karet, dan lain-lain. Hasil-hasil itulah yang sejak dahulu telah laku di pasar dunia. Dahulu negara penjajah yang membawanya ke pasaran, tetapi sekarang—sesudah negara-negara itu menjadi merdeka—pemerintah mereka sendiri yang melakukannya. Dengan devisa yang diperolehnya, masing-masing pemerintah negara berkembang ini membeli berbagai barang dari negara-negara yang dikenal sebagai negara maju. Bukan saja barang-barang seperti mesin, senjata, mobil, dan obat-obatan, tetapi juga kosmetika, pakaian, sapatangan/serbet kertas, makanan/minuman/buah-buahan dan barang-barang lain yang di negeri sendiri tidak ada, bahkan pun yang sudah dimilikinya sendiri, seperti: selai, sirup, ikan kaleng, jeruk, sabit, mistar, kancing baju, garam, dan lain-lain.

Di manakah sumber devisa berada, dan siapakah pula penciptanya? Bagaimana "nasib" mereka dan keadaan kesehatan mereka khususnya? Situasi demikianlah yang dalam tahun 1978 dalam konperensi bersama WHO—UNICEF di Alma Ata—mendorong

pemerintah 134 negara dan banyak badan sukarela mengesahkan konsep *Primary Health Care* (PHC) sebagai jalan menuju ke arah "Sehat bagi Semua di Tahun 2000."

Sementara itu daya upaya telah banyak dicoba untuk mewujudkan semboyan mulia tersebut di sana-sini, ada yang berhasil, ada yang gagal, ada yang menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Ada yang berupa daya upaya politis, sosial-ekonomis, organisatoris, dan teknis. Seluruh bagian buku *Practising Health for All* membeberkan masalah ini sebagai kajian pengalaman yang menarik dan berharga.

## Kasus Kerala

Sebenarnya sudah ada dua negara yang mempunyai masyarakat yang sehat di Dunia Ketiga, yaitu Tiongkok dan Kuba. Dari sudut politik kedua negara ini memang mempunyai banyak persamaan. Tetapi dari sudut perawatan atau penyelenggaraan kesehatan, masing-masing menempuh caranya sendiri sendiri. Tiongkok menggunakan tenaga *barefoot doctor* yang dipilih dari kalangan sendiri oleh yang bersangkutan. Setelah mendapat latihan kesehatan seperlunya, mereka bekerja di desa atau daerah kerja masing-masing preventif maupun kuratif. Hanya jika menemui kasus-kasus yang sulit, *barefoot doctor* akan mengirim pasiennya ke tenaga kesehatan ahli. Juga dalam hal obat-obatan yang digunakan. Tiongkok memanfaatkan kedua-duanya sekaligus, yang tradisional dan yang moderen.

Kuba hampir sama sekali sebaliknya dari Tiongkok. Di sana tidak dikenal tenaga kesehatan yang tidak ahli, obat tradisional sama sekali tidak dipakainya pula. Informasi tentang penyakit diberikan sesedikit mungkin, justeru untuk menjaga jangan sampai masyarakat "main dokter" sendiri. Pasien dibikin bergantung kepada dokter. Namun demikian *Health for All* bukan lagi semboyan kosong.

Contoh menarik juga misalnya Kerala, negara bagian di India Selatan. Meskipun Kerala tidak banyak memperoleh perhatian dari pemerintah pusat India, khususnya jika dibandingkan dengan negara bagian Maharashtra, namun Kerala justeru mempunyai jumlah ranjang rumah sakit lebih ba-

nyak, angka butahuruf lebih rendah, umur rata-rata lebih panjang (Kerala 63,8 tahun, sedangkan rata-rata seluruh India 52,0 tahun), angka kelahiran terendah, juga angka kematian balita terendah. "Prestasi" demikian itu pun dicapai dengan pendapatan per kapita US\$135, yang bahkan masih lebih rendah dari pendapatan per kapita rata-rata seluruh India yang US\$190 (hal. 65).

Kegagalan India dalam memecahkan masalah kependudukan biasanya selalu diikuti dengan mengkambinghitamkan kaum tani yang butahuruf dengan adab kebiasaannya yang tidak rasional (hal. 80). Tetapi jika memperhatikan Kerala yang juga agraris, maka: *The real causes of poverty, social underdevelopment, and high fertility are the unjust organization of Indian society and the unfair distribution of wealth . . . To blame the impoverished peasantry for any observed population-resources imbalances is clearly to blame the victim.*

Pemerintah Kerala tidak mempunyai banyak uang, tetapi penuh semangat bekerja untuk mewujudkan keadilan sosial. Dilaksanakannya landreform, pendidikan untuk semua, diciptakannya lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja tetapi bermodal kecil . . . Maka, walhasil, kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. Sehubungan dengan usaha ini juga pendidikan bagi kaum wanita merupakan masalah yang sangat penting. Daripadanya keadaan gizi keluarga akan membaik, angka kematian bayi menurun, angka kelahiran menurun, wanita ikut memainkan peranan di luar dapur . . . , karenanya kehidupan sosial akan berkembang.

Contoh yang sangat menarik tentang peranan wanita dalam hubungan ini, dikemukakan oleh Lindsey Hilsum, sebagai hasil pengamatannya di Republik Dominika (hal. 114/32). Republik di Amerika Tengah ini hidup dari gula, kopi, coklat, dan lain-lain yang diekspornya ke Amerika Serikat. Tidak banyak luas tanah yang bisa dipakai untuk menghasilkan kebutuhan pangannya sendiri. Kurang dari separuh dari seluruh luas areal. Dari itu pun masih banyak yang dipakai untuk hewan daging, yang sebagian besar dimakan di luar republik ini sendiri. Keadaan kesehatan di wilayah baratdaya paling buruk. Maka bersama dengan Caritas Domini-

cana, Catholic Relief Services (CRS) Amerika Serikat memulai usahanya untuk memperbaiki kesehatan anak-anak (1962). Dengan segala cara, tetapi tanpa menyertakan di dalamnya masalah pendidikan.

Melihat usaha mulia yang gagal itu, seorang ahli gizi dan beberapa orang ibu tampil dan bekerja dengan caranya sendiri. Pekerjaan di mulai dengan menimbang berat badan anak, inventarisasi makanan yang tersedia dan gizi yang ada, membuat pekarangan menjadi kebun tanaman dapur, kursus kesehatan anak-anak bagi para ibu. Dari pengalaman mereka mendapat bukti bahwa, timbangan berat badan anak naik pada saat musim mangga dan apukat (bulan Mei dan Oktober), dan dalam bulan Desember, justru bulan ketika bantuan pangan luar negeri habis!

Enam tahun kemudian anak berkekurangan gizi tidak lagi terdapat di sana. Pada 1974 hanya terdapat 20 persen anak-anak sehat, tetapi sekarang 75 persen!

Dari *Encuentro de la Mujer* yang diselenggarakan sekali dalam dua tahun untuk mengkonsolidasi kegiatan, kaum ibu dari daerah miskin di Dominika itu akhirnya membentuk organisasi yang dinamakannya "Wanita dari Selatan." Dalam kegiatannya yang sangat luas dan dilaksanakan dengan sangat intensif itu, "Wanita dari Selatan" menempuh berbagai cara: diskusi, membuat resep-resep penyakit dan masakan, nyanyian, penerangan melalui radio, dan sejenis permainan teater yang dinamakannya *sosiodrama*.

Inilah beberapa baris dari nyanyian-nyanyian mereka, sebagai contoh:

Ketahuilah hai, kawanku  
Hari ini kita tak bisa belanja  
Harga beras 34 sen sudah  
dan 40 sen untuk sebatang sabun  
Di daerah miskin tersia ini  
Kering sudah ludah untuk bicara:  
"Beaya hidup terlalu tinggi,  
beban pun tak lagi tertanggungkan."

Bersama :

Ayo, wanita, ayo!  
Ayo maju bersama  
Bahu-membahu bekerja  
Membangun hari esok!

Sebuah nyanyian lagi yang disusunnya ketika menyambut Tahun Anak-anak 1979, berbunyi antara lain:

Anak-anak riang-gembira  
Hak-hak mulia dalam Piagam  
Sekarang saatnya terselenggara  
Dalam Tahun Anak-anak Sedunia

Bisakah anak jadi besar  
tanpa susu tanpa daging?  
Bila demam pun mengancam  
dan maut mengintai?

Ada yang lahir bahagia  
dibuai hak-hak mulia  
Banyak yang lahir tersia  
tak sepatutnya hak menyapanya  
dan seterusnya, dan seterusnya

## Strategi Dasar

Wanita merupakan faktor sangat penting dalam usaha mencapai *Health for All*. Merekalah yang berdiri di barisan terdepan. Bukan para dokter, birokrat, dan para pemilik perusahaan obat-obatan. Dokter dan para ahli lainnya mempunyai peranan besar di dalam penyelenggaraan kesehatan yang *hospital based*. Tetapi, hendaknya disadari, bahwa selama penyelenggaraan kesehatan sesuatu negara masih bercorak *hospital based*, selama itu *Health for All* tetap akan sekedar hiasan bibir. Sebab, rumah sakit akan tetap berdiri jauh dari bagian terbesar penduduk serta penyakit-penyakit mereka. Lihatlah pada Ghana sebagai contoh. Memperoleh kemerdekaan politik 1957, Ghana sekarang mempunyai jumlah dokter 3 kali lipat, perawat kesehatan 4 kali lipat, rumah sakit 2 kali lipat dibanding dengan masa prakemerdekaan. Tetapi kondisi kesehatan

masyarakat, yang diurus dengan strategi *hospital based*, tidak menjadi lebih baik ketimbang jaman kolonial. Ghana lalu memperbarui tekad; 80 persen penduduk yang kurang atau sama sekali tak sehat, itulah yang harus menjadi arahan kebijaksanaan kesehatan. Strategi dasar pun lalu diubah. Bukan *hospital based* tetapi *community based*.

Menutup tulisan ini, berikut adalah sepa-tah kalimat "resep" dari seorang dokter Filipina, Jaime Z. Galvez-Tan:

*My work with the peasants has led me to a rude awakening that the health problems of our country are inter-related with the problems of economics, politics, and culture of our country and our people; and that the health situation will remain basically the same unless fundamental structural changes are made . . . "* (hal. 166/7).

Walhasil *Practising Health for All* adalah sebuah buku dengan jangkauan pembaca sangat luas, namun ditunaikannya dengan tuntas. Ia layak dibaca oleh para dokter dan pekerja kesehatan umumnya, oleh tokoh pemerintahan dan para penganjur pembangunan, oleh pekerja kemasyarakatan dan kaum pergerakan khususnya kaum wanita . . . Pendek kata oleh mereka yang di dalam kalbunya masih terdengar berbisik-bisik kata-kata: *homo sacra res homini*.

JITSKE MULDER \*

\* Penulis tinjauan ini adalah guru Bahasa Belanda di Erasmus "Pusat Kebudayaan Belanda" dan Agama di Sekolah Belanda Nederlandse Internationale School Slipi, Jakarta Barat.





## Peran Ulama tak Surut, bahkan sebaliknya

Kami senantiasa mengikuti dengan cermat tulisan para ulama muda, seperti di Jakarta: Abdurrahman Wahid, Zamakhsyari Dhoefier, M. Dawam Rahardjo, Djohan Effendy, Adi Sasono, Fachry Ali, Syu'bah Asa dan lain-lain. Ini antara lain karena kami sedang menunggu kedatangan seorang *mujaddid* (pembaru) dan *imam* untuk zaman ini, sebagaimana diramalkan akan muncul tiap permulaan abad Hijriyah (Hadist Riwayat Abu Daud, Ahmad dan Nasa'i). Siapa tahu, salah satu dari mereka diangkat Tuhan sebagai *mujaddid* abad ini, mengingat keadaan dunia yang sedang menghadapi jalan buntu dalam memecahkan problematika umat manusia.

Tetapi, membaca tulisan Fachry Ali dalam *Prisma* No. 4, April 1984 tentang "Pasang surut peranan politik ulama", sedikit banyak tergores rasa kecewa di hati.

Pertama, dia membatasi ulama, yakni mereka yang mengobarkan Perang Aceh dan sekarang yang bermusyawarah di Situbondo. Padahal kita semua tahu bahwa definisi ulama adalah cendekiawan ahli ilmu, sehingga pembatasan seperti di atas jelas kurang tepat.

Kemudian dinyatakan antara lain, bahwa politik kaum ulama surut akibat sekularisasi, birokratisasi dan munculnya Islam kota. Kesimpulannya: proses ulama selama hampir satu setengah abad terakhir sungguh merupakan proses pelucutan diri (hal. 30).

Padaahal, apakah benar ada dikhotomi antara "Islam kota" dan "Islam pedesaan"? Adakah kaum muslimin—dari aliran mana pun dan dimana pun—yang tidak perlu berkonsultasi dengan ulama, baik lisan ataupun tertulis? Ulama sebagai *think-tank* dari umat Islam akan tetap dibutuhkan di segala bidang, karena: mereka yang paling tahu ilmu-

nya dan yang paling diharapkan sebagai panutan karena selama 24 jam harus bisa mencerminkan pengejawantahan al-Qur'an dalam praktek keseharian.

Mungkin, penerimaan musyawarah Situbondo terhadap satu asas Pancasila terdorong oleh itikad agar tidak terjebak dalam retorika ribut-ribut istilah Islam vis a vis Pancasila. Yang penting untuk saat ini ialah bagaimana mengingatkan umat yang menyimpang dari al-Qur'an dan as-Sunnah serta menjadikan mereka manusia yang bijak, baik, tulus dan benar, di samping mendesakkan sanksi yang kuat terhadap mereka yang menggunakan Pancasila hanya sebagai hiasan bibir saja. Dus, kaum ulama bukannya menjadi surut peranannya atau melucuti diri sendiri sebagaimana kesimpulan Fachry Ali, melainkan sebaliknya.

Keengganan sebagian penguasa—yang notabene kaum muslimin juga—terhadap pengamiran politik kaum ulama, mungkin karena dua perkara:

1. Oknum-oknum penguasa yang korup, sewenang-wenang atau berbuat maksiat terhadap Allah s.w.t. pasti alergi untuk dibimbing ke jalan *istiqomah*. Jadi bukan akibat sekularisasi, birokratisasi ataupun modernisasi menurut premis Fachry Ali.

2. Oknum-oknum ulama sendiri ada yang menjadi Kyai "Jarkoni" — bisa "mengajar" tetapi tidak bisa *nglakoni*, sehingga mereka tidak dijadikan panutan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin.

Terima kasih atas perhatian Redaksi *Prisma* terhadap analisa kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

IMAM MUSA PROJOSISWOYO  
Jl. Otto Iskandardinata II  
Rt. 003/09 no. 7 Bidaracina  
Jatinegara — Jakarta Timur.

AGA SUGANDHY, lahir di Bandung tanggal 6 Oktober 1943, adalah Kasubdit Perencanaan Umum Wilayah, pada Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah, Ditjen Cipta Karya, Dep. Pekerjaan Umum RI, dan Koordinator Proyek Nasional Regional Planning and Preparation on Investment Oriented Project di NTB-NTT, UNDP-IBRD. Tamat dari *Institut Teknologi Bandung* (ITB) tahun 1971, melanjutkan studi ke *West-Vlaamse Economische Studie Bureau*, Nederland, selesai 1973. Gelar *M.Sc.* di bidang Desain Lingkungan diperolehnya dari *University of British Columbia*, Amerika Serikat (1980), dengan tesis berjudul "The Impact Assessment of Tourism Development on Agricultural Land-use in Bali". Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, antara lain: Penelitian Perundang-undangan Bina Kota (1971), Penelitian Perencanaan Kota dan Daerah (1971-1980), Penelitian Penyusunan Program dan Proyek Pembangunan Daerah (1980-1984), Seminar Human Settlement (Kanada, 1979), Seminar ASEAN on Regional Planning (Denpasar, 1982), Konferensi ASEAN on Planning and Housing (Kuala Lumpur, 1984).

AMIR KARAMOY, lahir di Menado tahun 1947, adalah staf peneliti LP3ES, Manajer Proyek Studi Monitoring dan Evaluasi Program Perbaikan Kampung Urban III (1980-1984), staf pengajar tetap pada Fisipol UI Jakarta, dan anggota Panitia Pacific Youth Forum 1984. Tamat sebagai sarjana sosiologi dari *Universitas Indonesia* tahun 1975. Pernah mengikuti Post Graduate Centre Human Settlement, *University of Leuven* (Belgia) dan UNCHS (HABITAT) tahun 1982, Koordinator ENDA (Programme formation pour l'environnement) untuk Asia Tenggara, Koordinator Studi Masalah Pemuda di Perkotaan untuk Daerah Asia, Australia dan Pasifik, Universitas PBB; dan research associate UNESCO untuk studi perkotaan dan lingkungan hidup. Aktif dalam berbagai seminar dan lokakarya tentang pe-

mukiman dan perkotaan, antara lain: yang diselenggarakan IBRD (Washington, 1980), ENDA (Quito, 1981), IDRC (Manila, 1980; Penang, 1981; Seoul, 1984), UNESCO (Lyon, 1982), Pasific Science Assc. (Dunesin, 1983), UNU (Rome, 1984). Beberapa karangan yang diterbitkan antara lain: dalam Taufik Abdullah (ed.), *Pemuda dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: LP3ES, 1983); J.J. Guibert & M. Pacheco (eds.), *El despertar de los Pobladores*, (ENDA, 1983), Ian Burton (ed.), *Vulnerability and Resilience in the Evolution of Cities*, UNESCO, Population Division, 1984; dan McGee & Y.M. Yeung (eds.), *Participatory Urban Services in Asia*, (IDRC, 1984, akan terbit).

BUDHY TJAHJATI SOEGIJANTO SOEGIJOKO, lahir 18 Mei 1941 di Purwokerto, adalah dosen, Ketua Program S-2 Perencanaan Wilayah & Kota ITB, dan Peneliti pada Lembaga Penelitian Planologi ITB, Bandung (sejak) 1974. Spesialisasi Transportasi. Anggota, Ikatan Ahli Perencanaan (IAP); American Planning Association (APA); (International) Transportation Research Board (TRB). Tamat dari *Institut Teknologi Bandung* (1970), melanjutkan studi ke *University of Harvard*, Amerika Serikat, dan meraih gelar *Master of City Planning* (1973). Memperoleh gelar *Ph.D.* dalam Urban Transportation and Planning dari *Massachusetts Institute of Technology*, A.S. (1980). Pernah menjadi Research Fellow UNCRD di Nagoya, Jepang (1975). Aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah antara lain: Penelitian Karakteristik & Sistem Kota-kota di Indonesia (1984-1985), Perencanaan Fisik Wilayah Kawasan Industri Besar Lhokseumawe (1983-1984), Studi Perencanaan Jaringan Jalan Regional Prop. Kalsel (1982-1983), *Low Cost Transportation in Indonesia: The Becaks* (1975-1977), EAROPH Congress, Jakarta (1981), Conference on Urban Transport (CODATU III) di Paris, 1983. Di antara karya tulisnya: *Public Transportation in Ban-*

*dung*, (Bandung: ITB Press, 1981), *Urban Transportation: Mass System v.s. Individual*, 8th EAROPH Congress Paper, 1982; *Public Transportation in Some Indonesia Cities*, (Dep. Planologi-ITB, 1983).

FACHRY ALI, lahir tanggal 23 November 1954 di Susoh, Blang Pidie, Aceh Selatan, adalah staf Peneliti pada Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), dan mahasiswa tingkat terakhir Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Aktif mengikuti berbagai diskusi dan seminar, serta banyak menulis tentang masalah-masalah sosial, politik dan keagamaan di berbagai media massa, terutama *Kompas*, *Tempo*, *Panji Masyarakat* dan *Prisma*.

A. RAMLAN SURBAKTI, lahir di Tigan-derket, Tanah Karo, tanggal 20 Juni 1951. Lulus dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1978) kemudian menjadi staf pengajar tetap pada Fakultas Sospol Universitas Airlangga, Surabaya. Memperoleh gelar MA dalam Ilmu Perbandingan Politik dari Departemen Ilmu Politik, Universitas Ohio, Amerika Serikat (1982), dengan tesis berjudul *Urban Poverty and Kampung Improvement Programme in Surabaya*.

SUKANTO REKSOHADIPRODJO, lahir di Semarang tanggal 4 November 1940, adalah

Dekan Fakultas Ekonomi, UGM, Yogyakarta. Memperoleh gelar B.Sc. dari Fak. Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, melanjutkan studi ke *University of Illinois*, AS, dan meraih gelar M. Com. Gelar M.A. dan Ph.D. diperolehnya dari *University of Colorado*, Amerika Serikat. Aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah antara lain: Penelitian Dampak Sosial Ekonomi Proyek Perluasan Kilang Cilacap (1981/1982), Identifikasi Potensi Industri Daerah WPP 1 Sumut (1982/1983), Seminar Aspek Ekonomi Kebijaksanaan Pertanahan Kota (1983), Seminar Tata Guna Tanah Berencana dan Pembangunan Kodya Yogyakarta (1983), Benefit Cost Analysis of Natural Systems and Environmental Quality Aspect of Management, (Manila, 1981), Konference of Fed of ASEAN Econ. Assoc Bangkok on Renewable Res, 1983. Di antara karyanya antara lain: Buku *Ekonomi Perkotaan* bersama AR Karseno; Buku *Ekonomi Lingkungan*, bersama Budi Purnomo; "Oil and other energy resources for development: The Indonesian Case", *Journal of Energy & Development*, V, 2, 1980; "Regional Development as a Strategy for economic development of Indonesia", *Masyarakat Indonesia*, IV, no. 1-2; "Growth with Equity: Indonesian Case", *Masyarakat Indonesia*, III, 2, 1981; "Relationship between OPEC and Non-OPEC with emphasis on ASEAN countries", *Indonesian Quarterly*, X, 1, 1982.